

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, pengelolaan keuangan Dana Kampung menjadi isu strategi isu yang paling banyak dibicarakan adalah keseluruhan kampung di kabupaten mamberamo raya yang berjumlah 61 kampung dari 12 Distrik. Anggaran yang diberikan tidak sedikit, setiap kampung akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga, 1.4 miliar Rupiah.

Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 di jelaskan bahwa kampung menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya. Kampung merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan dana kampung tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan Pemerintahan pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan untuk memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih khusus di kampung kapeso Distrik Mamberamo hilir, Kabupaten Mamberamo Raya.

Kampung pada umumnya mempunyai Pemerintahan sendiri yang dikelola secara baik oleh Aparat Kampung dan Bamuskam yang menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat yang memiliki kewenangan Hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Disisi lain, penyerahan segala urusan Pemerintahan Kampung berkonsekuensi pada ketersediaan anggaran kampung,

Menurut PP. No. 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan Urusan Pemerintah Kampung diKabupaten Mamberamo Raya akan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah dimana Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya yang di serahkan kepada Kampung dan diberikan Bantuan Dana lewat APBN, (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kabupaten Mamberamo Raya secara khusus di Kampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir.

Dengan demikian Peneliti tertarik dengan mengangkat judul : Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat diKampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir, Kabuapten Mamberamo Raya.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya?

2. Bagaimana Pengalokasian Bantuan Dana Kampung dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya?
3. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya ?
 - b. Untuk mengetahui Pengalokasian Bantuan Dana Kampung dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya?

C . Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang Kebijakan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana kampung dalam meningkatkan Kemampuan dan Kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

Memberikan Informasi tentang Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung dalam meningkatkan Kemampuan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan Masukan yang berguna dan menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan Publik (Public Policy) dalam literatur-literatur Ilmu Politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Menurut Winarno menyatakan bahwa di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Kebijakan di pahami sebagai ‘’ serangkaian Kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta Konsekuensi- konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan tersendiri kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada

penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi pihak (Solichin, 2014).

Kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. Suatu tindakan publik yang telah ditetapkan dan disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut.

2. Konsep Pembangunan

Menurut Torado dalam Lepi T. Tarmidi, 2010 Pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan maupun nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ideal dipakai sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali seluruh sistem ekonomi dan sosial.

Sukirno (2015), Menyatakan bahwa konsep pembangunan mempunyai 3 (tiga) sifat penting yaitu : (1), Proses terjadinya perubahan terus-menerus, (2), Adanya usaha untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, (3), Pembangunan ekonomi telah di gariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan dan

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sedang berkembang.

Pengertian Pembangunan Menurut Hanafi 2016 menyatakan bahwa, Pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950 sampai dengan 1960- an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian masyarakat kesulitan kendati pun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain ada tanda-tanda kesalahan besar untuk mengartikan dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya di sadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya menaikkan pendapat nasional saja tetapi pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

3. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sunarti (2012), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang di liputi rasa keselamatan, kesulitan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga masyarakat untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

4. Alokasi Dana Kampung (ADK)

a. Pengertian Alokasi Dana Kampung

Alokasi dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Daerah yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar kampung untuk memadai kebutuhan masyarakat kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kampung dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat. dana kampung merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten Mamberamo Raya yang di salurkan melalui rekening kampung, alokasi dana kampung adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang secara langsung diterima oleh daerah di kabupaten Mamberamo Raya.

Adapun maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Kampung di maksud untuk membiayai program pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan pembangunan serta perbedayaan masyarakat di kampung.

b. Tujuan dari Alokasi Dana Kampung adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat
4. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat
5. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Besarnya Alokasi dana Kampung ditetapkan dengan rincian :Dari hasil pajak daerah kabupaten mamberamo raya, diperhitungkan besarnya 10%. Sesuai pasal 2A undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang “ perubahan atas undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.” Bantuan sebagaimana dimaksudkan angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70% sebagaimana Alokasi Dana Kampung minimal dan Alokasi Dana kampung 30% .

6. Perhitungan

Dalam pengalokasian dana kampung didasarkan pada perhitungan alokasi dana kampung untuk masing-masing kampung yang dilakukan dengan adil dan merata yang dimaksud dengan azas

merata adalah besarnya bagian alokasi dana kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya di sebut alokasi dana kampung.

7. Penetapan Alokasi Dana Kampung

Alokasi dana kampung didasarkan pada ketetapan dan peraturan Bupati dan hasil perhitungan aloksi dana kampung dimaksud di beritahukan kepada kampung selambat-lambatnya bulan agustus setiap tahunnya.

Sedangkan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan Kepada Fasilitas Kabupaten Pada bulan Maret untuk Perhitungan Alokasi dana kampung tahun berikutnya.

8. Pengaturan dan Pengelolaan

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap alokasi dana kampung maka pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan Peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelolah alokasi dana kampung di setiap kampung diantaranya : Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh kepala kampung yang dituangkan kedalam peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung :

1. Pengelolaan Keuangan alokasi dana kampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja kampung beserta lampirannya.
2. Seluruh kegiatan yang ditangani oleh alokasi dana kampung harus direncanakan.sesuai prosedurnya.

3. Alokasi dana kampung dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien, terarah, terkendali serta akuntabel dan tanggung jawab.
4. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kampung
5. Alokasi Dana Kampung salah satu sumber pendanaan kampung
6. Pengelolaan alokasi dana kampung dilakukan oleh pemerintah kampung yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kampung.

9. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kampung

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana kampung pemerintah kampung mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

Adapun yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kampung adalah :

- a. Hak pemerintah kampung
- b. Kewajiban pemerintah kampung
- c. Tanggung jawab pemerintah kampung

10. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Sebagai program unggulan pemerintah kampung maka alokasi dana kampung dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip pengelolaan
 1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/ terbuka dan di ketahui oleh masyarakat luas
 2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggung jawab secara administrasi, teknis dan hukum
4. Mengfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
5. Hasil kegiatan dapat di ukur dan dapat dinilai tingkat kebersihannya
6. Hasil kegiatan dapat di lestarikan dan di kembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah, provinsi, kabupaten , kecamatan dan hingga kampung.

b. Dasar-dasar Pengelolaan

Adapun yang menjadi dasar pengelolaan alokasi dana kampung berdasarkan Undang-undang No. 60 tahun 2014 tentang Desa/ Kampung dan Peraturan menteri dalam Desa No. 5 tahun 015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa/ Kampung tahun 2015. Sedangkan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia diterbitkan No. 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian , penyaluran, pemantauan, atau evaluasi dana desa pada tanggal, 14 mei 2014.

Surat edaran menteri dalam Negeri No. 140/286/SJ tanggal 17 februari 2006 perihal pelaksanaan alokasi dana desa/kampung, dan surat edaran menteri dalam Negeri No. 140/1784/2006 tanggal 3

oktober 2006 perihal tanggapan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa,serta perubahan peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang pemerintahan Desa dalam Proses Perubahan.

11. Penggunaan

Alokasi dana kampung yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar 30 % dari jumlah penerimaan alokasi dana kampung (ADK), Sedangkan untuk Pemberdayaan Kampung sebesar 70% dari arah penggunaan alokasi dana kampung (ADK) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan kampung alokasi dana kampung yang digunakan belanja aparatur dan operasional kampung yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah kampung dengan prioritas sebagai berikut :
 1. Peningkatan sumber daya manusia kepala Kampung dan perangkat Kampung meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi Banding
 2. Biaya operasional Tim Pelaksana bidang pemerintahan
 3. Biaya Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW Penguatan Kelembangan RT/RW
 4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala kampung

5. Biaya penyediaan data dan pembuatan laporan, pertanggung jawaban meliputi : pembuatan monografi, peta dan lain-lain data dinding
 6. Penyesunan APBD, LPPD, dan LKPJ, Pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana Kampung
 7. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
2. Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Kampung yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti :
- a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Intistusi.
 - b. Biaya pemberdayaan lingkungan
 - c. Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi dan sebagainya

Alokasi Dana Kampung untuk biayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pemberdayaan manusia disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan Alokasi dana kampung yang diterima oleh pemerintah kampung berdasarkan musyawarah tentang penggunaan Alokasi dana kampung.

12. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung diantaranya :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perencanaan

3. Tahap Pelaksanaan
4. Tahap Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Pengawasan
5. Tahap Pelaporan Keuangan

E. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2003 :70) Hipotesis merupakan Jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dan juga hipotesis itu merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.

Dengan demikian merumuskan hipotesis sebagai berikut : Jika Kebijakan Pengalokasian Bantuan dana Kampung dilaksanakan dengan baik maka Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat akan lebih baik.

F. Definisi Operasional

Menurut Ricard M. Steers (2010), menyatakan bahwa Definisi Operasional adalah unsur Peneliti yang dilakukan bagaimana caranya mengukur variabel.

Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel.

- a. Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung dimaksudkan agar dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya.

Adapun Indikator-indikator Variabel Kebijakan Pengalokasian Bantuan Dana Kampung diantaranya :

1. Kebijakan Pemerintah Kampung terhadap Pengalokasian Dana Kampung di Kampung Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir
2. Bagaimana Pembangunan terhadap Masyarakat di kampung kapeso, Distrik Mamberamo Hilir
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kampung terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kampung Kapeso Distrik Mamberamo Hilir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Emzir 2010), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan di hasilkan dalam segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah legitimate.

Pada penelitian Kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi di kampung kapeso Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya

3. Teknik Pengambilan Informan

Menurut Wesis (1994) dalam Laksmi (2015) menjelaskan bahwa pemilihan peserta penelitian atau informan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif sehingga perlu untuk

dijelaskan. Hal tersebut dikarenakan peran yang aktif yang pada individu yang diteliti. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih baik melakukan interview dengan sedikit orang secara berulang-ulang. Dari pendapat diatas, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yaitu :

Tabel 1

Data Spesifikasi Informan

Kelompok Informan	Posisi / Peran dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Kampung	1. Kepala Kampung	1
	2. Sekertaris kampung	1
	3. Ketua Bamuskam	1
	4. Toko Adat	1
Jumlah		4

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut lofland moleang (2011:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, jenis data dibagi dalam kata-kata,tindakan, sumber data tertulis, foto,dan lainnya.

Data adalah bahan keterangan dalam suatu obyek penelitian yang diperoleh. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash (2008) dalam Herdiansyah (2012 : 118), menyatakan bahwa Wawancara diartikan sebagai interaksi yang didalamnya terdapat peraturan atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/ memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Hasil yang diharapkan dari wawancara dari para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2012:143) menyatakan bahwa Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data Kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri/ oleh orang lain tentang subyek.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara.

3. Observasi

Menurut (Chartwright & Chartwright (dalam Herdiansyah (2012) menyatakan bahwa Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “Merekam” perilaku secara

sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Adapun observasi dilakukan oleh peneliti ialah mengerti secara langsung

5. Teknik Pengolaan Data

Dalam pengolaan data ini, penulis menggunakan 3 (tiga) tahap pengolaan yaitu :

a. Editing

Dalam tahap ini sebelum data diolah, maka perlu diperiksa kembali data yang telah di isi oleh responden menyangkut pengisian, keterbatasan tulisan dan referensi jawaban guna mengatakan apakah itu dapat digunakan atau tidak.

b. Koding

Kegiatan kedua adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macamnya. dan klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu guna memudahkan penelitian dalam penggolongannya.

c. Tabulating

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengelompokkan jawaban-jawaban serupa teliti dan teratur dalam bentuk tabel yang di persiapkan sebelumnya dengan menggunakan alat bantu berupa perhitungan persentase yang di rumuskan sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan :

P = presentase

F = Frekuensi

n = Respoden

100% = Konstan

(Anton Dajan, 1986: 17)

6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian kegiatan analisis data yang telah dilakukan dari laporan, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab semua masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. Teknik analisis data di kumpulkan peneliti menggunakan teknik Konsultatif dengan bantuan tabel persentase dan penjelasan kualitatif.